

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN HUBUNGAN  
DENGAN NEGARA-NEGARA MELANESIA DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO  
2014-2016**

**Ribut Puja Kesuma**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: [ribut.puja.2014@fisipol.umy.ac.id](mailto:ribut.puja.2014@fisipol.umy.ac.id)

**ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang alasan rasional Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan hubungan dengan negara-negara Melanesia anggota *Melanesia Spearhead Group (MSG)* dalam kurun waktu 2014-2016. Keputusan peningkatan hubungan tersebut melalui sebuah proses kalkulasi untung dan rugi bagi Indonesia terutama menyangkut kedaulatan Indonesia. Hubungan Indonesia dengan negara-negara Melanesia tidak lepas dari isu Papua dan upaya kelompok sparatis *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* untuk menjadi anggota MSG. Tulisan ini akan menjelaskan tentang pertimbangan rasional Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo sebagai Aktor Rasional dalam meningkatkan hubungan dengan negara-negara Melanesia serta upaya mempersempit ruang gerak kelompok sparatis *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)*.

**Kata Kunci:** Presiden Joko Widodo, Peningkatan Hubungan, Aktor Rasional, *Melanesia*, *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)*.

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI**

Naskah publikasi dengan judul :

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN HUBUNGAN  
DENGAN NEGARA-NEGARA MELANESIA DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO**

**2014-2016**

Disusun Oleh :

**RIBUT PUJA KESUMA**

**20140510311**

Yang Disetujui,



**Drs. Djumadi M. Anwar., M.Si**

Dosen Pembimbing

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang menganut Politik Luar Negeri ‘Bebas Aktif’. Politik Luar Negeri ‘Bebas Aktif’ disini maksudnya yaitu politik “Bebas”, berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok kekuatan negara-negara super power dan memiliki jalannya sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Sedangkan istilah “Aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dunia (Hatta, 1953, hal. 444). Meskipun menganut Politik Bebas Aktif, pada kenyataannya Indonesia tetap memprioritaskan kepentingan nasional dalam menjalankan politik luar negerinya, hal tersebut dapat dilihat dari lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia. Dalam lingkaran konsentrisnya Indonesia menempatkan Asia Tenggara atau ASEAN sebagai lingkaran konsentris pertamanya dan yang kedua yaitu ASEAN+3 (Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan), dan lingkaran konsentris selanjutnya yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa (KEMENLU, 2015).

Kawasan Pasifik terutama kawasan Pasifik Selatan yang secara geografis hampir sama jaraknya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, selama ini hanya dianggap sebagai “halaman belakang” bagi Indonesia. Ada banyak hal yang menyebabkan Kawasan Pasifik Selatan belum menjadi lingkaran konsentris Indonesia, *pertama*, negara-negara di kawasan Pasifik Selatan merupakan negara-negara Kepulauan yang kecil dan mayoritas menggantungkan perekonomian pada sektor pariwisata dan tambang (kecuali Australia dan Selandia Baru), sehingga kurang menguntungkan bagi Indonesia. *Kedua*, ketika negara-negara di kawasan Pasifik Selatan mengalami dekolonisasi dan memperjuangkan kemerdekaannya pada dekade 1960-1980-an Indonesia sedang mengalami masa transisi kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, sehingga kurang memperhatikan dinamika di kawasan tersebut.

*Ketiga*, sejak terjadinya dekolonisasi di kawasan Pasifik Selatan yang masih berjalan hingga saat ini, mulai muncul semangat keetnosentrisan antar sesama negara-negara di kawasan tersebut, salah satunya yaitu *Melanesian Way* (Jalan Melanesia). Semangat tersebut yang kemudian memunculkan sikap anti-Indonesia dari masyarakat negara-negara ras Melanesia karena Indonesia dianggap telah menjajah dan dituduh melakukan pelanggaran HAM terhadap ras Melanesia di Papua, sehingga Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan kerap kali berbeda pandangan tentang isu Papua di forum-forum internasional, terutama di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dimulai pada 20 Oktober tahun 2014 silam, Indonesia berusaha meningkatkan hubungan dengan negara-negara ras Melanesia di kawasan Pasifik Selatan. Hal tersebut dibuktikan peningkatan status Indonesia dari yang sebelumnya hanya observer dari tahun 2011 kemudian menjadi associate member di organisasi sub-regional *Melanesian Spearhead Group (MSG)* pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-20 MSG pada tanggal 26 Juni 2015 di Honiara, Kepulauan Solomon (Arisandy, 2015). Dengan ditingkatkannya status Indonesia tersebut menjadikan Indonesia bisa berperan lebih di dalam organisasi tersebut, baik untuk kemajuan bersama maupun untuk kepentingan nasional Indonesia. Status tersebut juga menjadi kesuksesan Indonesia dalam diplomasi kepada negara-negara anggota MSG, karena pada saat bersamaan kelompok pro-kemerdekaan *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* juga mengajukan diri untuk menjadi anggota MSG, ULMWP akhirnya harus puas hanya sebagai *observer* di MSG (Retaduari, 2016).

Wakil Menteri Luar Negeri RI, A. Mochammad Fachir yang mewakili pemerintah RI dalam KTT memberikan pernyataan yang dikutip dari [Metrotvnews.com](http://Metrotvnews.com) bahwa :

"Peningkatan status sebagai *associate member*, Indonesia berkomitmen untuk terus mempromosikan kerja sama yang erat dan konkrit dengan MSG untuk menggali potensi dan mengatasi tantangan pembangunan bersama," (Nugraha, 2015)

Komitmen Presiden Jokowi melalui visi Nawa Citanya, melakukan pembangunan signifikan dan memberikn perhatian lebih terhadap Papua yang selama ini notabene menjadi batu pengganjal hubungan antara Indonesia dengan negara-negara ras Melenasia sedikit demi sedikit dapat terkikis. Tidak menutup kemungkinan kawasan Pasifik Selatan juga akan menjadi lingkaran konsentris politik luar negeri seperti Asia Tenggara, bahkan Indonesia bisa menjadi pintu gerbang integrasi antara kawasan Asia Tenggara dengan Kawasan Pasifik Selatan.

### **Model Aktor Rasional Graham T. Alisson**

Sebuah proses kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara tentu saja tidak dibuat dengan sembarangan oleh para pengambil kebijakan di negara tersebut. Kebijakan luar negeri keluar biasanya melalui proses analisis yang panjang dengan data dan fakta yang akurat. Kebijakan luar negeri juga tidak lepas dari kepentingan nasional, dimana suatu negara dalam memutuskan sebuah kebijakan luar negeri tentu memikirkan *feedback* untuk negaranya.

Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri yang di ambil oleh sebuah negara telah melalui proses kalkulasi untung dan rugi bagi negara tersebut.

Salah satu tokoh yang menganalisis proses kebijakan luar negeri yaitu Graham T. Allison, dimana dalam jurnalnya yang berjudul *The American Political Science Review (Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis)* (Allison, 1969, hal. 689-718) menyatakan bahwa :

*“The assumption of rational behavior not just of intelligent behavior, but of behavior motivated by conscious calculation of advantages, calculation thalt in turn is based on an explicit and internally consistent value system.”*

Dalam menganalisis suatu proses kebijakan luar negeri menurut Graham T. Allison dapat digunakan Model Kebijakan Rasional (*rational policy model*). Proses kebijakan itu sendiri secara teoritik sangat dipengaruhi oleh adanya faktor politik domestik dan eksternal internasional. Dalam perspektif *“Decision Making Process”*, Graham T Allison mengajukan tiga paradigma yang dapat digunakan untuk mempermudah menganalisis kebijakan luar negeri negara-negara di dunia, yaitu Model Aktor Rasional (MAR), Model Proses Organisasi (MPO), dan Model Politik Birokratik (MPB).

Model Aktor Rasional menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif atau opsi, konsekuensi, dan pilihan keputusan. Model ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan prudent. Model ini dalam pengambilan kebijakannya lebih menekankan kepada peran pihak eksekutif, yaitu Presiden atau Kepala Pemerintahan dari suatu negara. Hal tersebut dikarenakan model Aktor Rasional ini biasanya digunakan pada saat masa krisis, sehingga membutuhkan keputusan sesegera mungkin dengan pertimbangan alternatif-alternatif yang ada. Keputusan yang diambil tentu saja keputusan dengan risiko terkecil dan keuntungan terbesar bagi negara tersebut.

## **ISU PAPUA MENJADI ALASAN PENINGKATAN HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP NEGARA-NEGARA MELANESIA DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO**

Peningkatan hubungan dengan negara-negara Melanesia tentu telah melalui proses kajian mendalam terhadap alternatif-alternatif yang ada, serta melalui kalkulasi keuntungan dan kerugian sebagai aktor rasional dalam penentuan alternatif terbaik. Peningkatan hubungan juga menjadi jalan bagi Indonesia untuk memaanuver upaya-upaya diplomasi dari kelompok separatis Papua *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) untuk memperoleh dukungan dari negara-negara Melanesia.

#### **A. Meraih Dukungan Negara-Negara Melanesia**

Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo tidak lagi menganggap kawasan Pasifik Selatan sebagai “halaman belakang” dalam politik luar negerinya. Indonesia serius untuk hadir di kawasan Pasifik Selatan dan bersama-sama dengan negara-negara Melanesia untuk memajukan kawasan Pasifik Selatan. Berikut merupakan upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk meraih dukungan dari negara-negara Melanesia:

##### **1. Gencarnya Pembangunan Infrastruktur di Papua pada Era Presiden Joko Widodo**

Pada masa pemerintahannya saat ini sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki agenda Nawa Cita (Sembilan Cita-Cita) yang ingin diwujudkan pada masa pemerintahannya, yaitu periode 2014-2019. Salah satu isi dari Nawa Cita tersebut yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” (KOMPAS, 2014), yang maksudnya adalah Presiden Jokowi menginginkan daerah-daerah perbatasan, terluar, terdepan, dan ujung negeri harus menikmati pembangunan seperti daerah-daerah lainnya untuk mewujudkan sila kelima dari Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Selama ini, wilayah Papua memang kerap menjadi sorotan terutama karena sulitnya akses ke Pulau tersebut. Kondisi geografis Papua yang dipenuhi dengan pegunungan dan hutan yang lebat menyebabkan sulitnya sarana transportasi di daerah tersebut. Transportasi utama yang sangat diandalkan di Papua adalah pesawat terbang, tetapi itupun tergantung dengan cuaca yang ada. Sehingga segala kebutuhan logistik, baik makanan, pakaian, maupun bahan

material bangunan harus menggunakan pesawat untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Papua.

Target utama yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi, yaitu penurunan kesenjangan harga-harga kebutuhan pokok antara Papua dengan daerah-daerah lain di wilayah Indonesia bagian barat. Program utama yang dilakukan yaitu pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk mempermudah akses ke wilayah-wilayah pegunungan maupun pelosok di daerah Papua. Pembangunan infrastruktur tersebut berupa Jalan Trans Papua, bandar udara-bandar udara baru, maupun pelabuhan-pelabuhan baru yang berfungsi mewujudkan impian Tol Laut Presiden Jokowi. Jalan Trans Papua dianggap menjadi solusi terbaik untuk mempermudah mobilitas dan akses di Papua, karena lebih banyak wilayah-wilayah pelosok yang terjamah dan terbuka aksesnya serta pemanfaatannya tidak bergantung pada cuaca.

Tercatat pada tahun 2016 Jalan Trans Papua telah terealisasi sepanjang kurang lebih 3.667 km dari target 4.325 km yang ditargetkan rampung pada tahun 2018 (Aditiasari, 2016), dua terminal udara baru, yakni Bandar Udara Wamena dan Bandar Udara Kaimana dan tiga pelabuhan baru (Simorangkir, 2017). Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Jokowi juga menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur di Papua yang nominalnya semakin meningkat setiap tahunnya.

Bukti-bukti keseriusan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini menjadi modal berharga dalam upaya Indonesia untuk meyakinkan negara-negara Melanesia. Pesatnya pembangunan di Papua ini juga kerap kali digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mematahkan argument-argumen dari kelompok separatis Papua yang disebarkan kepada masyarakat di negara-negara Melanesia. Dalam setiap kesempatan kunjungan ke negara-negara Melanesia, pejabat-pejabat tinggi Indonesia selalu menekankan bahwa Papua merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menunjukkan bukti-bukti keseriusan pemerintah Indonesia saat ini kepada negara-negara Melanesia.

Misalnya dalam kunjungan Menteri Koordinator Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan pada saat kunjungan ke Fiji pada bulan April 2016, menyampaikan bahwa :

"Indonesia adalah negara yang berdaulat sehingga tidak boleh ada satupun negara di dunia ini yang mendikte kita. Saya secara langsung menyampaikan kepada pemerintah Republik Fiji dan Papua Nugini bahwa Papua dan Papua Barat adalah bagian terintegrasi dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Fakta itu bersifat final dan tidak dapat dirundingkan lagi. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk Papua dan Papua Barat. Dari segi pembiayaan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sampai upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia" (Kusumadewi, 2016).

Dengan bukti-bukti tersebut secara perlahan namun pasti Indonesia mulai mendapatkan dukungan dari beberapa negara Melanesia, diantaranya yaitu Fiji dan Papua Nugini. Hal tersebut dibuktikan dengan abstainnya kedua negara tersebut dalam setiap pertemuan negara-negara Pasifik Selatan yang membahas mengenai kemerdekaan Papua, terutama semenjak seringnya kunjungan pejabat tinggi Indonesia ke dua negara tersebut di era Presiden Joko Widodo.

## **2. Politik “Budi Baik” Terhadap Negara-Negara Melanesia**

Indonesia berupaya menggunakan politik “Budi Baik” terhadap negara-negara Melanesia. Politik “Budi Baik” tersebut dilakukan dengan cara seringnya Indonesia memberikan bantuan kepada negara-negara Melanesia, baik itu bantuan berupa dana ataupun pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Hingga saat ini, Indonesia telah menyelenggarakan tidak kurang dari 130 bantuan program teknis, melibatkan 583 peserta dari negara-negara Pasifik. Bantuan program teknis tersebut diantaranya dalam sektor seperti pertanian, perikanan, *good governance*, disaster management, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Dalam bantuan tersebut pemerintah Indonesia mengklaim telah menggelontorkan dana bantuan sekitar 1,8 juta Dollar AS atau sekitar Rp23,6 Triliun kepada negara-negara anggota MSG. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir yang dilansir melalui KBR.id:

"Selama ini kita juga terus memberikan bantuan *capacity building* kepada negara-negara MSG dari 2014 sampai dengan 2016 ini. Jumlahnya sudah



lebih dari sekitar USD 1,8 juta bantuan teknis dalam bentuk *capacity building*. Kita berikan kepada negara-negara anggota MSG di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, *good governance*, *disaster management*, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Itulah nuansa kita" (Wijaya, 2016).

Kemudian pada pertengahan Maret 2015, bencana alam Topan Pam menghantam kawasan Pasifik Selatan dan Vanuatu menjadi negara yang paling terdampak akibat bencana tersebut. Topan tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang masif. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memberikan bantuan senilai total 2 (dua) juta Dollar AS untuk membantu pemulihan di Vanuatu pasca bencana tersebut (Gabrillin, 2015). Selain Vanuatu, negara Melanesia lainnya yang sempat terkena bencana Topan yaitu Fiji. Bencana Topan Winston menghantam negara Fiji pada tanggal 21-21 Februari 2015. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyerahkan secara simbolis bantuan senilai 5 (lima) juta Dollar AS kepada Perdana Menteri Fiji JV Bainimarama saat melakukan kunjungan kehormatan ke Fiji pada tanggal 31 Maret 2015 (Nursalikhah, 2015).

Indonesia mencoba mengkontruksi pemikiran dari negara-negara Melanesia tentang kebaikan Indonesia, sehingga dapat berdampak pada dukungan terhadap Indonesia dalam isu Papua. Usaha Indonesia dengan meningkatkan hubungan dengan negara-negara Melanesia tidak sia-sia, meskipun belum semuanya tetapi ada beberapa negara yang telah menunjukkan dukungan terhadap Indonesia, baik dukungan terhadap kehadiran Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan maupun dukungan terhadap bergabungnya Indonesia di MSG. Negara-negara tersebut yaitu Papua Nugini dan Fiji, kedua negara tersebut sangat mendukung upaya Indonesia untuk menyelesaikan sendiri permasalahan didalam negerinya (isu Papua) dan tidak melakukan intervensi terhadap penyelesaiannya serta mendukung Indonesia tetap menjaga keutuhan wilayahnya (Karafir, 2016).

## **B. Strategi Untuk Mempersempit Ruang Gerak ULMWP di Dunia Internasional**

Untuk mengamankan posisi Indonesia dalam isu Papua, pemerintah Indonesia selain meningkatkan hubungan dengan negara-negara Melanesia juga harus menggunakan strategi-startegi diplomasi lain. Penguatan posisi Indonesia dibandingkan dengan kelompok separatis Papua *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) dimata negara-negara Melanesia menjadi hal yang penting, terutama untuk meredam dukungan dari negara-negara Melanesia terhadap upaya memerdekakan Papua dari Indonesia. Terdapat dua strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo, yaitu sebagai berikut:

### **1. Memperkuat Pengaruh Indonesia di *Melanesian Spearhead Group* (MSG)**

Posisi Indonesia sebenarnya belum terlalu aman, meskipun di MSG status Indonesia telah ditingkatkan namun Indonesia harus tetap mengantisipasi manuver-manuver politik dari ULMWP serta upaya diplomasinya untuk mengubah sikap Fiji dan Papua Nugini agar menerima mereka sebagai anggota tetap di MSG. Hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah memperkuat pengaruh mereka di MSG, salah satu contoh yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memperkuat pengaruh di MSG yaitu dengan membantu mengatasi kesulitan keuangan yang dialami oleh sekretariat MSG. Seperti yang dikutip dari radionz.co.id, Sade Bimantara juru bicara Kedutaan Besar Indonesia di Australia menyampaikan bahwa:

"...kami telah memberikan kontribusi tahunan kami, terlebih lagi kami juga membantu secretariat (MSG) dalam pengadaan kendaraan dan barang lainnya untuk sekretariat mereka. Ya, jadi kami telah membantu mereka secara finansial juga" (Goissler, 2018).

Gencarnya diplomasi Indonesia terhadap negara-negara Melanesia yang mendukung penuh kedaulatan Indonesia menyebabkan perdebatan diantara negara-negara anggota tetap di MSG. Menurut laporan Radio New Zealand, Wakil Perdana Menteri Kepulauan Salomon Manasseh Sogavare menuding Fiji memaksa anggota MSG lain, yakni Papua Nugini dan Vanuatu untuk menerima keanggotaan Indonesia. Langkah itu dianggap bermasalah lantaran MSG

cenderung mendukung kemerdekaan bangsa Melanesia di Indonesia dan sedang mempersiapkan keanggotaan penuh bagi organisasi separatisme Papua ULMWP. Sedangkan Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama membalas pernyataan tersebut seperti dikutip media Australia, ABC bahwa:

"Kedaulatan Indonesia atas Papua Barat tidak bisa diganggu gugat. Jadi ketika kita berurusan dengan Papua Barat dan penduduknya, kita tidak punya pilihan selain berurusan dengan Indonesia dengan cara positif dan konstruktif" (DEUTSCHE WELLE, 2018).

Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan ekonomi sub-kawasan Melanesia di bawah Kepemimpinan Papua Nugini di *Melanesian Spearhead Group (MSG)*. Dalam Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-21 *Melanesian Spearhead Group (MSG)* di Port Moresby, Papua Nugini, pada 12 Februari 2018 lalu, Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Desra Percaya. Pada kesempatan itu Desra menyampaikan berbagai kemajuan kerjasama Indonesia di MSG. Salah satunya yaitu Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh pada *MSG Regional Security Strategy Working Group (RSS WG)* sejak tahun 2017.

Kehadiran Indonesia sebagai bagian utuh didalam tubuh MSG, dinilai sangat menguntungkan bagi negara-negara anggota MSG. Secara nyata, Indonesia bertindak sebagai jembatan antara MSG ke berbagai kerjasama regional lainnya, termasuk ASEAN, APEC, dan IORA. Ditambah lagi, sejumlah bantuan teknis terus diberikan oleh Indonesia kepada negara-negara anggota MSG dan Sekretariat MSG. Indonesia juga berupaya agar MSG dapat difokuskan ke bidang ekonomi dibandingkan bidang politik. Hal tersebut disampaikan oleh Desra setelah pertemuan tersebut.

“Indonesia juga sepenuhnya mendukung usulan Sekretariat MSG untuk terapkan *MSG Corporate Plan 2018-2020* sebagai langkah efektif mencapai visi *MSG 2038 Prosperity for All*. Namun, kami mengingatkan agar para anggota terus menjalankan mandat sesuai prinsip pembentukan MSG, termasuk tidak mencampuri urusan negara lain, apalagi terkait kedaulatan. Penting bagi MSG untuk fokus pada tujuan bersama mencapai kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan, *good governance* dan

keamanan. Untuk itu, perhatian MSG tidak perlu teralihkan oleh isu-isu yang tidak relevan” (Wardhana, 2018).

Hasil dari diplomasi dan pengaruh Indonesia di MSG tersebut, Indonesia kembali berhasil menggagalkan upaya ULMWP untuk mengajukan diri sebagai anggota tetap MSG. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-21 *Melanesian Spearhead Group (MSG)* tersebut, kelompok separatis Papua ULMWP kembali mengajukan keanggotaannya. Tetapi keanggotaan itu kembali ditolak oleh beberapa negara anggota MSG. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Ketua Delegasi Indonesia pada KTT tersebut, yaitu Desra Percaya bahwa:

"Pada KTT MSG ke-21 di Port Moresby, aplikasi keanggotaan kelompok separatis di *Melanesian Spearhead Group (MSG)* kembali menemui jalan buntu. Atas dasar apapun, jelas tidak ada tempat bagi kelompok separatis," (METROTV NEWS, 2018)

Pada KTT di Port Moresby tersebut, sejumlah pemimpin MSG kembali mempermasalahkan keinginan kelompok ULMWP untuk menjadi anggota penuh di MSG dan menilai bahwa kelompok ini tidak pantas menjadi anggota penuh di MSG. Pembahasan yang dilakukan dalam format *Leaders' Retreat* menyepakati panduan keanggotaan dan mengembalikan aplikasi kelompok separatis tersebut ke Sekretariat. Para pemimpin MSG juga meminta agar Sekretariat MSG merumuskan aturan dan kriteria mengenai keanggotaan. Dengan perkembangan tersebut, maka masih perlu dilakukan pembahasan khusus terkait substansi kriteria keanggotaan dengan menerapkan kembali mekanisme semestinya, yaitu melalui forum tingkat pejabat tinggi, menteri dan terakhir diusulkan ke para pemimpin. Prinsip-prinsip pembentukan MSG yang telah direvisi pada 2015, juga menegaskan bahwa anggota MSG wajib menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Dengan pengambilan keputusan secara konsensus serta dukungan kuat dari sahabat Indonesia di MSG yang menghormati dan junjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan organisasi, khususnya terkait penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah, maka aplikasi keanggotaan oleh kelompok tersebut akan selalu menghadapi jalan buntu dan tidak mungkin terealisasi. Menurut Desra KTT kali

ini membuahkan hasil yang positif bagi Indonesia, seperti yang dilansir dari [metrotvnews.com](http://metrotvnews.com) yaitu:

"Hasil KTT MSG 2015 jelas menegaskan bahwa kehadiran kelompok separatis tersebut di MSG hanyalah sebagai salah satu peninjau mewakili sekelompok kecil separatis yang berdomisili di luar negeri. Pernyataan kelompok separatis yang mengaku sebagai perwakilan resmi masyarakat Papua di MSG, tentunya sangat tidak adil bagi 3,9 juta penduduk Propinsi Papua dan Papua Barat. Lebih dari dua juta warga provinsi Papua dan Papua Barat selama ini telah menjalankan hak demokratisnya dengan bebas dan adil. Aspirasi seluruh rakyat kedua propinsi tersebut terwakili dalam sistem demokrasi terbuka yang ada di Indonesia" (METROTV NEWS, 2018).

Pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-21 *Melanesian Spearhead Group (MSG)* tersebut, Indonesia juga menyampaikan kembali komitmennya untuk menjadi mitra yang kuat bagi negara anggota MSG dalam mewujudkan visi MSG 2038 '*Prosperity for All*', suatu rencana besar 25 tahun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sub-kawasan Melanesia. Hal tersebut ditegaskan oleh Desra Percaya pada saat KTT berlangsung.

"Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan sub-kawasan Melanesia di bawah keketuaan Papua Nugini di *Melanesian Spearhead Group (MSG)*" (METROTV NEWS, 2018).

## **2. Mendekatkan Diri Dengan Negara-Negara Mitra Dari Negara-Negara Melanesia**

Dalam upaya Indonesia untuk memenangkan hati dari negara-negara Melanesia, pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo juga melakukan pendekatan terhadap negara-negara yang selama ini menjadi mitra dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang termasuk didalamnya negara-negara Melanesia. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam nilai tawarnya di *Melanesian Spearhead Group (MSG)* dibandingkan dengan kelompok separatis Papua ULMWP. Negara-negara yang terus dijaga hubungan baiknya dengan Indonesia yang juga merupakan mitra dari negara-negara Melanesia yaitu Australia, Selandia Baru, dan Chile.

Indonesia dan Australia sendiri memiliki sejarah hubungan yang tambal sulam, namun kedua pemimpin tertarik untuk menekankan komitmen mereka terhadap hubungan yang kuat. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, seperti yang dilansir dari parstoday.com bahwa:

"Hubungan yang kuat dapat dibuat bila kedua negara menghormati integritas wilayah masing-masing, non-interferensi dalam urusan dalam negeri masing-masing dan kemampuan untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan" (PARS TODAY, 2018).

Australia menjadi penting bagi Indonesia dalam isu Papua, karena di Australia banyak terdapat anggota kelompok separatis yang mencari suaka politik ke Australia. Selain itu juga terdapat banyak mahasiswa Indonesia asal Papua yang berkuliah di Australia, sehingga dengan menjaga hubungan yang erat dengan Australia serta kerjasama yang konkrit diberbagai sektor pemerintah Indonesia optimis pemerintah Australia tidak akan melakukan intervensi dalam isu Papua ini.

Kedekatan Australia dengan negara-negara Pasifik Selatan yang didalamnya termasuk negara-negara Melanesia, menjadi modal yang positif bagi upaya diplomasi Indonesia untuk membendung dukungan internasional terhadap kelompok separatis Papua ULMWP. Faktor historis dan bantuan ekonomi dari pemerintah Australia kepada negara-negara menyebabkan sikap Australia akan menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam setiap kebijakan luar negeri negara-negara tersebut. Sehingga ketika Australia bersikap abstain atau malah mendukung pemerintah Indonesia dalam isu Papua ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri negara-negara Melanesia dalam isu Papua.

Negara kedua yaitu Selandia Baru. negara ini menjadi penting bagi negara-negara Pasifik Selatan karena secara geografis, Selandia Baru sangat dekat dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Di Selandia Baru juga terdapat banyak mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari berbagai negara Melanesia, tidak terkecuali dari Indonesia yang berasal dari Papua. Bercampurnya mereka disana menyebabkan berkembangnya ideologi Melanesianisme atau *Melanesian*

*Brotherhood* tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh kelompok separatis Papua untuk menarik simpati dari mahasiswa-mahasiswa tersebut dan masyarakat lokal Selandia Baru untuk mendukung mereka dalam upaya memerdekakan diri dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam melihat hal tersebut. Indonesia melakukan pendekatan terhadap pemerintah Selandia Baru, salah satu contohnya yaitu kunjungan Presiden Joko Widodo pada Maret 2018. Kunjungan tersebut membahas banyak hal, baik kerjasama maupun membahas isu-isu internasional. hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya seperti yang dikutip dari detik.com bahwa:

"(Perwakilan) menjelaskan posisi Indonesia dalam permasalahan kemanusiaan di Rohingnya, konflik nuklir di Korea, sengketa di Laut China Selatan, Sengketa daging di WTO, IUU Fishing, dan tentu saja soal Papua" (Ramdhani, 2018).

Pemerintah Selandia Baru memang tegas menunjukkan dukungan kepada pemerintah Indonesia terkait isu Papua, hal tersebut dibuktikan dengan pemblokir aktivitas anggota Partai Hijau, Catherine Delahunty, yang meminta pemerintah mendukung referendum bagi Papua pada tahun 2016 (TEMPO, 2016). Pemerintah Selandia Baru dapat memahami dan posisi Indonesia termasuk soal Papua. Baik pemerintah maupun Ketua oposisi, Simon Bridges yang bertemu Presiden setelah pertemuan dengan pemerintah mengakui integritas teritorial Indonesia.

Selain kedua negara tersebut, terdapat satu negara lagi yang juga merupakan mitra penting bagi negara-negara Pasifik Selatan termasuk didalamnya juga negara-negara Melanesia. Negara tersebut yaitu Chile, negara ini dianggap penting karena geografisnya serta kedekatan dengan negara-negara Pasifik Selatan. Chile merupakan sebuah negara yang berada di benua Amerika bagian selatan, negara ini secara geografis memiliki keunikan tersendiri karena wilayahnya yang berada dibagian barat benua Amerika dan memiliki garis pantai yang panjang menghadap ke Samudera Pasifik. Sehingga tidak mengherankan

jika negara ini memiliki armada laut yang besar dan perekonomian yang ditunjang dari sektor perikanan (CIA, 2015).

Dengan begitu negara ini memiliki peranan yang penting di Samudera Pasifik, sehingga tidak mengherankan jika Chile memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Kekuatan angkatan laut Chile yang bermanfaat untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Samudera Pasifik, selain itu Chile sangat terbuka terhadap negara-negara Pasifik Selatan. Contohnya di Chile menjadi hal yang lumrah ketika menjumpai banyak masyarakat dari negara-negara Pasifik Selatan yang berkunjung kesana, serta mengisi panggung hiburan dengan menampilkan tradisi-tradisi dari negara asal mereka. Seringnya interaksi antara masyarakat dan pemerintah Chile dengan masyarakat dari negara-negara Pasifik Selatan yang didalamnya termasuk negara-negara Melanesia menyebabkan isu Papua dan Melanesia juga berkembang disana.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah jitu untuk memanuver upaya negara-negara Melanesia tersebut. Langkah yang diambil adalah dengan mengangkat Duta Besar Republik Indonesia untuk Chile yang berasal dari Papua, yaitu Philemon Arobaya (KEMENLU, 2015). Pengangkatan Philemon tidak hanya dikarenakan pengalamannya yang sudah puluhan tahun menjadi diplomat Indonesia, tetapi juga bertujuan untuk menunjukkan kepada pemerintah Chile bahwa Papua merupakan bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibuktikan dengan pengangkatan Duta Besar dari ras Melanesia yang berasal dari Papua. Sehingga hal tersebut akan mematahkan argument-argumen dari masyarakat Melanesia tentang pemerintah Indonesia yang melakukan penjajahan di Papua.

Philemon memiliki misi khusus, selain tugas utamanya untuk menjaga persahabatan Indonesia-Chile yang telah berusia lebih dari 50 tahun tepatnya sejak 1965, Ia juga bertugas untuk meyakinkan pemerintah dan masyarakat Chile bahwa pemerintah Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo sangat serius dalam membangun dan memajukan Papua. Sehingga pemerintah Chile tidak perlu turut



campur dalam isu Papua, karena hal tersebut merupakan urusan dalam negeri Indonesia. Sejauh ini pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan ketiga negara mitra negara-negara Melanesia tersebut agar isu Papua dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah Indonesia tanpa campur tangan pihak asing. Setidaknya sudah ada dua negara Melanesia yang diyakinkan oleh pemerintah Indonesia untuk tidak mendukung kelompok separatis Papua dan mendukung penuh kedaulatan Indonesia di Papua, yakni Fiji dan Papua Nugini.

## **Kesimpulan**

Isu Papua menjadi alasan utama peningkatan hubungan dengan negara-negara Melanesia, strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempersempit ruang gerak diplomasi kelompok separatis Papua ULMWP dalam upaya mereka untuk mendapatkan dukungan internasional yaitu *pertama*, menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo dalam membangun dan memajukan Papua melalui program-program strategis nasional. *Kedua*, dengan melakukan politik “Budi Baik” terhadap negara-negara Melanesia melalui bantuan-bantuan, baik bantuan berupa dana maupun bantuan teknis untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). *Ketiga*, memperkuat posisi Indonesia di MSG melalui bantuan pendanaan terhadap sekretariat MSG dan menawarkan kerjasama konkrit dibidang ekonomi kepada negara-negara Melanesia yang tujuannya adalah untuk mengubah fokus MSG dari politik ke ekonomi. *Keempat*, mendekatkan diri dengan negara-negara mitra dari negara-negara Melanesia, negara-negara tersebut yaitu Australia, Selandia Baru, dan Chile.

Hasil dari strategi diplomasi Indonesia tersebut yaitu Indonesia berhasil meraih dukungan dari dua negara Melanesia yang juga merupakan anggota MSG yaitu Fiji dan Papua Nugini. Kedua negara tersebut berhasil membantu upaya Indonesia untuk mencegah kelompok separatis Papua ULMWP untuk menjadi anggota tetap di MSG pada KTT ke-21 MSG di Port Moresby tahun 2018. Selain itu melalui diplomasinya Indonesia juga berhasil mempengaruhi negara-negara anggota MSG untuk menggeser fokus MSG dari politik ke ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Melanesia di kawasan Pasifik Selatan. Hal tersebut dibuktikan

dengan dihasilkannya sebuah visi besar MSG untuk tahun 2038, yaitu *Prosperity for All* yang diawali dengan *Corporate Plan 2018-2020* sebagai langkah efektif mencapai visi MSG 2038 sebagai hasil dari KTT MSG Ke-21 di Port Moresby, Papua Nugini tahun 2018.

### **Daftar Pustaka**

Aditiasari, D. (2016, Jsnuari 7). Ini Penampakan Jalan Trans Papua. Retrieved Maret 7, 2018, from [www.detik.com](http://www.detik.com): <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3112503/ini-penampakan-jalan-trans-papua>

Allison, G. T. (1969). Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis. *The American Political Science Review*, 689-718.

Arisandy, Y. (2015, Juni 27). Indonesia Peroleh Anggota Asosiasi Dalam MSG. Retrieved Februari 24, 2018, from [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com): <https://www.antaraneews.com/berita/503823/indonesia-peroleh-status-anggota-asosiasi-dalam-msg>

CIA. (2015). SOUTH AMERICA :: CHILE. Retrieved April 20, 2018, from [www.cia.gov](http://www.cia.gov): <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ci.html>

DEUTSCHE WELLE. (2018, Maret 23). Diplomasi Indonesia Picu Perang Mulut Antara Fiji dan Kep. Salomon. Retrieved April 20, 2018, from [www.dw.com](http://www.dw.com): <http://www.dw.com/id/diplomasi-indonesia-picu-perang-mulut-antara-fiji-dan-kep-salomon/a-43097730>

Goissler, W. (2018, Februari 19). RI Akui Bantu Atasi Kesulitan Keuangan Sekretariat MSG. Retrieved April 20, 2018, from [www.satuharapan.com](http://www.satuharapan.com): <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ri-akui-bantu-atasi-kesulitan-keuangan-sekretariat-msg>

Hatta, M. (1953, April). Indonesian Foreign Policy. *Foreign Affairs (pre-1986)*, p. 444.

KEMENLU. (2015, Februari 28). Duta Besar RI Menyerahkan Surat Kepercayaan (Credentials) Kepada Presiden Republik Chile. Retrieved April 20, 2018, from [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id): <https://www.kemlu.go.id/santiago/id/arsip/siaran-pers/Pages/Duta-Besar-RI-Menyerahkan-Surat-Kepercayaan-Credentials-Kepada-Presiden-Republik-Chile.aspx>

KEMENLU. (2015). Kerjasama Regional. Retrieved November 7, 2017, from [www.kemenu.go.id](http://www.kemenu.go.id): <https://www.kemenu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/default.aspx>

KOMPAS. (2014, Mei 21). "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK. Retrieved Maret 7, 2018, from [www.kompas.com](http://www.kompas.com): <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>

Kusumadewi, A. (2016, April 04). Pesan Luhut ke Pasifik Selatan: Papua Milik Indonesia. Retrieved April 20, 2018, from [www.cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160404073157-20-121435/pesan-luhut-ke-pasifik-selatan-papua-milik-indonesia](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160404073157-20-121435/pesan-luhut-ke-pasifik-selatan-papua-milik-indonesia)

METROTV NEWS. (2018, Februari 15). MSG Kembali Menolak Aplikasi Keanggotaan Kelompok Separatis. Retrieved April 20, 2018, from [www.metrotvnews.com: http://internasional.metrotvnews.com/asia/eN4xAjON-msg-kembali-menolak-aplikasi-keanggotaan-kelompok-separatis](http://internasional.metrotvnews.com/asia/eN4xAjON-msg-kembali-menolak-aplikasi-keanggotaan-kelompok-separatis)

Nugraha, F. (2015, Juni 27). Raih Status Anggota MSG, Indonesia Siap Kerja Sama Teknis. Retrieved Desember 2017, 3, from [www.metrotvnews.com: http://internasional.metrotvnews.com/asia/zNP6aBWk-raih-status-anggota-msg-indonesia-siap-perkuat-kerja-sama-teknis](http://internasional.metrotvnews.com/asia/zNP6aBWk-raih-status-anggota-msg-indonesia-siap-perkuat-kerja-sama-teknis)

Nursalikah, A. (2015, Maret 31). Luhut Serahkan Bantuan Indonesia untuk Fiji. Retrieved Februari 26, 2018, from [www.republika.co.id: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/31/o4vpw9366-luhut-serahkan-bantuan-indonesia-untuk-fiji](http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/31/o4vpw9366-luhut-serahkan-bantuan-indonesia-untuk-fiji)

PARS TODAY. (2018, Februari 26). Kunjungan Presiden RI ke Australia. Retrieved April 20, 2018, from [parstoday.com: http://parstoday.com/id/news/indonesia-i33530-kunjungan\\_presiden\\_ri\\_ke\\_australia](http://parstoday.com/id/news/indonesia-i33530-kunjungan_presiden_ri_ke_australia)

Ramdhani, J. (2018, Maret 20). Dubes: Demo Separatis Papua Tenggelam dengan Kedatangan Jokowi ke NZ. Retrieved April 20, 2018, from [www.detik.com: https://news.detik.com/berita/3927477/dubes-demo-separatis-papua-tenggelam-dengan-kedatangan-jokowi-ke-nz](https://news.detik.com/berita/3927477/dubes-demo-separatis-papua-tenggelam-dengan-kedatangan-jokowi-ke-nz)

Retaduari, E. A. (2016, Juli 14). Kelompok Pro-Papua Merdeka Gagal Jadi Anggota Penuh MSG. Retrieved November 7, 2017, from [www.detik.news.com: https://news.detik.com/berita/3253641/kelompok-pro-papua-merdeka-gagal-jadi-anggota-penuh-msg](https://news.detik.com/berita/3253641/kelompok-pro-papua-merdeka-gagal-jadi-anggota-penuh-msg)

Simorangkir, E. (2017, Mei 12). Selain Jalan, Jokowi Bangun Pelabuhan hingga Bandara di Papua. Retrieved Maret 7, 2018, from [www.detik.com: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3498754/selain-jalan-jokowi-bangun-pelabuhan-hingga-bandara-di-papua](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3498754/selain-jalan-jokowi-bangun-pelabuhan-hingga-bandara-di-papua)

TEMPO. (2016, Mei 03). Selandia Baru Blokir Aksi Opisisi Dukung Referendum Papua . Retrieved April 20, 2018, from [www.tempo.co: https://dunia.tempo.co/read/768157/selandia-baru-blokir-aksi-opisisi-dukung-referendum-papua](https://dunia.tempo.co/read/768157/selandia-baru-blokir-aksi-opisisi-dukung-referendum-papua)

Wardhana, E. F. (2018, Februari 15). Indonesia Dukung Penuh Kepemimpinan PNG di MSG. Retrieved April 20, 2018, from [www.sindonews.com: http://www.sindonews.com](http://www.sindonews.com)

<https://international.sindonews.com/read/1282503/40/indonesia-dukung-penuh-kepemimpinan-png-di-msg-1518698840>

Wijaya, R. (2016, Juli 14). indonesia\_klaim\_beri\_bantuan\_1\_8\_juta\_dolar\_as\_ke\_negara\_negara\_msg. Retrieved Februari 25, 2018, from www.kbr.id: [http://kbr.id/nasional/07-2016/indonesia\\_klaim\\_beri\\_bantuan\\_1\\_8\\_juta\\_dolar\\_as\\_ke\\_negara\\_negara\\_msg/83103.html](http://kbr.id/nasional/07-2016/indonesia_klaim_beri_bantuan_1_8_juta_dolar_as_ke_negara_negara_msg/83103.html)